

PREMANISME DAN PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA

Taufik Effendy

ABSTRAK

Tulisan berikut akan menyoroti fenomena premanisme khususnya seiring dengan era reformasi yang dikaitkan dengan desentralisasi, otonomi daerah, dan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) atau lebih jauh lagi dengan Pemilu sebagai pesta demokrasi di Indonesia. Dengan menilik pula 'hajatan politik' di daerah diasumsikan akan lebih jelas dalam mengkaji hubungan antara premanisme dan dinamika politik yang berkembang. Fenomena premanisme ini kemudian akan penulis korelasikan dengan konteks modernisasi dan shadow state.

Kata Kunci : Premanisme, Politik.

PENDAHULUAN

Kehadiran preman atau jago telah sejak dulu hingga sekarang ikut mewarnai retakan-retakan histories negeri ini. Ia sudah muncul pada zaman kerajaan-kerajaan kuno di tanah Jawa, periode kolonialisme, sampai pasca kemerdekaan. Menarik untuk membicarakan fenomena jago, preman, mafia, dan sebutan sejenis lainnya dalam sejarah Indonesia. Selain adanya institusi-institusi resmi, kehadiran kelompok 'abu-abu' tersebut acap kali ikut serta dalam dinamika perkembangan politik di republik ini. Akan sangatlah sulit bila kita memukul rata fenomena preman di Indonesia sebagai parasit yang harus dimusnahkan karena dalam

realitasnya mereka juga dibutuhkan dan digunakan oleh segelintir anggota masyarakat.

Kelompok 'abu-abu' tersebut tak bisa dipungkiri biasa berkolaborasi dengan institusi negara. Terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara negara dengan kelompok-kelompok tersebut. Misalkan bila institusi negara tak mampu untuk mengatasi persoalan yang menjadi tanggung jawabnya sendiri ia terkadang menggunakan jasa dari kelompok tersebut (ex. mengangkat Kol. Sjafei yang notabene jago daerah Senen untuk mengendalikan keamanan kota Jakarta pada dekade pertengahan tahun 1960-an). Bahkan lebih ekstrim daripada itu kelompok mafia

tersebut mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang besar untuk mempengaruhi pemerintah.

Kelompok preman dan jago biasa dimanfaatkan pula oleh berbagai kekuatan politik seperti partai peserta pemilihan umum. Demi menjangkau massa atau untuk kebutuhan 'keamanan' tak segan partai politik (politisi lokal) memasukkan mereka dalam salah satu sayap organisasinya seperti satgas (satuan tugas) yang berbau militeristik. Bahkan dewasa ini banyak ditemui perkumpulan preman yang berkedok organisasi masyarakat, kepemudaan, atau profesi dengan acap kali ditengarai bermuara pada salah satu partai. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu hal yang fundamental dalam modernisasi ialah pelembagaan atau institusionalisasi kekuasaan. Namun dengan adanya pengaruh jaringan kelompok preman, jago, atau mafia menyebabkan distorsi dalam pelembagaan politik karena mengarah kepada negara bayangan atau *shadow state*.

PEMBAHASAN

Secara etimologis 'premanisme' mungkin dipungut dari kosakata Belanda *virjeman* atau Inggris *free* (bebas) dan *man* (lelaki atau orang) yang terjemahannya orang bebas, tidak terikat. Semula *freeman* ini berkonotasi positif, diperuntukkan kepada orang-orang yang hidup secara bebas (merdeka), tidak pegawai negeri, juga tidak terikat dengan struktur apa pun, namun tidak mengganggu atau menyusahkan kehidupan orang lain.¹

Sedangkan isme adalah faham (aliran/ajaran). Jadi premanisme dimaksudkan kepada gerakan orang-orang bebas (merdeka) yang tidak mau terikat dengan aturan-aturan membosankan. Belakangan, sebutan *freeman* berubah makna lebih ditujukan ke konotasi negatif. Pelafalan *freeman* pun berubah jadi preman, yang maknanya ditujukan kepada orang jalanan yang hidup sesuka hati tanpa aturan.²

Kemudian Kelompok preman ini membentuk

¹ Hidayat Banjar, Premanisme Politik Dan Politik Preman dalam www.waspada.com, 24-3-2008 18:03 WIB

² Ibid.

komunitasnya sendiri, sehingga jadi semacam kekuatan (people power). Lama-kelamaan komunitas preman itu makin besar dan kuat serta berlindung atas nama organisasi pemuda. Tak jarang pula, dalam rangka perebutan proyek serta lahan: parkir, pasar, dan lain sebagainya, sesama organisasi pemuda (OKP) yang berbeda nama dan lambang saling baku hantam.³

Selain pengertian di atas, merunut faktor sejarahnya istilah preman muncul dan kemudian menyebar ke masyarakat setelah terjadinya pembunuhan seorang perwira polisi di Jakarta pada bulan Maret 1995.⁴ Setelah kejadian itu istilah preman digunakan oleh media massa untuk menyebut kejahatan. Istilah tersebut diperdebatkan secara etimologis hingga ciri khas keprofesionalan dan jenis-jenisnya. Istilah preman itu sendiri analog dengan penjahat (criminal).

Kejahatan tersebut sebenarnya telah lama hadir dalam masyarakat. Ada banyak nama untuk menyebut preman seperti brandhal,

lun, koyok, durjana, kecu, rampok, begal, maling, bromocorah, grayak, gedhor, garong, gali, dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut memberi ciri khas pada jenis kejahatan yang dilakukan. Namun pada intinya istilah tersebut mengacu kepada tindakan melawan hukum untuk menguasai milik orang lain dengan paksa atau dengan memanfaatkan kelengahan pemilik. Untuk jenis kejahatan tertentu dilakukan intimidasi dan bahkan dengan cara paksa disertai tindakan brutal sehingga tidak jarang terjadi penganiayaan dan pembunuhan.⁵

Preman merupakan patologi yang kerap dijumpai di banyak kota besar Indonesia yang salah satunya adalah kota Medan. Tumbuh dan berkembangnya preman tak bisa dilepaskan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota besar atau yang dikenal dengan daerah urban. Perkembangan kehidupan (sebagian) masyarakat kota besar yang relative lebih baik memiliki daya tarik yang kuat (*pull factor*) bagi anggota masyarakat desa untuk hijrah ke kota besar. Keadaan ini didorong pula oleh keadaan sosial dan ekonomi di

³ Ibid.

⁴ Suhartono. Artikel Prisma Edisi 002 (1996), hal 87

⁵ Ibid hal 87-88

desa yang sangat miskin (*push factor*) sehingga pilihan untuk eksodus ke kota dianggap menjadi opsi jalan keluar. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan preman di kota besar merupakan efek samping yang negatif dari urbanisasi.⁶

Perkembangan sarana transportasi yang demikian masif menyebabkan jarak antara desa ke kota tidak begitu berarti. Lalu-lintas yang lancar antara desa ke kota merupakan salah satu faktor pendorong urbanisasi. Peningkatan arus urbanisasi yang tidak diikuti oleh perluasan kesempatan kerja di kota akan menimbulkan pengangguran dan merupakan awal dari munculnya preman. Pengangguran baik yang terselubung maupun tidak melahirkan perilaku kriminal yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang kemudian dikenal dengan nama preman.⁷

Ada beragam kata kunci yang mengemuka dalam tulisan ini. Misalnya preman, desentralisasi, pemilihan kepala daerah langsung

(pilkada), *shadow state*, dan modernisasi. Medan pembicaraan kita tidak akan menyimpang jauh dari kata-kata kunci tersebut.

Seiring terbukanya katup kebebasan dengan turunnya rezim otoritarian Orde Baru pada medio Mei tahun 1998 lalu, berimplikasi pada banyak hal di republik ini terkait dengan demokratisasi. Misalnya dalam pemilihan presiden tahun 2004 kemarin atau yang kedua setelah era reformasi mulai dipergunakan sistem pemilihan secara langsung. Terlepas dari perdebatan tentang baik buruknya sistem pemilihan tersebut, apresiasi pantas diberikan karena sementara ini hal itu merupakan cara yang dianggap perlu untuk konsolidasi ke arah demokrasi setelah sekian lama tenggelam dalam tirani otoritarian.

Selain pemilihan presiden secara langsung, langkah konsolidasi demokrasi berikutnya yang tidak kalah *urgent* atau mendesak adalah semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu penyebab dari maraknya gerakan separatis dan disintegrasi nasional ditengarai karena ulah rezim terdahulu yang

⁶ Romli Atmasasmita. Artikel Prisma Edisi 007 .1996, hal. 78.

⁷ Ibid, hal. 78.

begitu monopolistis dan sentralistis. Bergulirnya UU No. 22 tahun 1999 mengubah paradigma lawas yang telah usang dan jauh dari spirit reformasi. UU No. 22 tahun 1999 tersebut mengakomodasi prinsip desentralisasi atau dengan kata lain daerah menjadi pemain utama dan menggusur intervensi berlebih dari pemerintah pusat.

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah dapat dipandang sebagai bagian penting dari prinsip Negara hukum sebab dengan desentralisasi dan otonomi daerah dengan sendirinya ada keterbatasan kekuasaan seperti yang dituntut dalam Negara hukum dan penganut konstitualisme. Bagir Manan menyebutkan ada tiga faktor yang memperlihatkan bagian erat antara demokrasi dan otonomi serta desentralisasi, yaitu pertama, untuk mewujudkan kebebasan (*liberty*), kedua untuk menumbuhkan kebiasaan di kalangan rakyat agar mampu memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkait langsung dengan mereka, dan ketiga, untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang

mempunyai tuntutan yang berbeda-beda.⁸

Terkait dengan jiwa desentralisasi maka wacana pemilihan kepala daerah secara langsung pun disahkan dalam UU No. 32 tahun 2004. Pilkada dapat dilihat bukan hanya sebagai bentuk dari kekecewaan terhadap sistem demokrasi perwakilan namun juga sebagai manifestasi desentralisasi di mana rakyat daerah dapat benar-benar berpartisipasi dalam dinamika demokrasi dan pembangunan di daerahnya.

Alhasil sumber daya yang ada di daerah menjadi ladang perebutan bagi beragam pihak. 'Arena pertempuran' berpindah dari pusat ke daerah. Sumber daya material diperebutkan oleh elite dan berbagai elemen masyarakat daerah. Pada masa rezim Soeharto elit politik lokal tak bisa leluasa untuk menikmati kekayaan daerah karena sepenuhnya ditujukan ke Jakarta. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kekayaan daerah menjadi hal yang relative lebih

⁸ Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, ctk Pertama, Gama Media, 1999, hal. 187.

leluasa untuk diperebutkan oleh entitas-entitas masyarakat lokal. Dalam pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) hal ini menjadi ajang yang mudah dilihat guna menyaksikan kompetisi dalam rangka perebutan sumber daya daerah tersebut.

Modernisasi mendorong perubahan dalam sistem social, ekonomi, dan politik yang kian kompleks. Tak urung hal itu menyebabkan munculnya beragam kelompok atau kelas baru dalam masyarakat. Huntington memandang bahwa masyarakat yang memiliki kelompok kelas menengah dengan tingkat partisipasi relative tinggi namun pranata politik yang ada tidak *capable*, cenderung dapat menggoncangkan tertib politik. Sebaliknya jika sistem politik dengan derajat pelebagaan politik yang tinggi dapat mengakomodir elemen-elemen masyarakat baru tersebut maka stabilitas akan tercapai. Olson juga melihat bahwa instabilitas dapat terjadi ketika kelas menengah yang massif menjadi motor penggerak perubahan.⁹

Modernisasi menyebabkan perubahan tatanan masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, kelompok-kelompok atau golongan yang ada masih bercorak askriptif. Sistem ekonomi tradisional dan jauh dari moderen. Partisipasi politik masih rendah dan hanya terbatas pada segolongan elit masyarakat saja.

Kendati sistem yang sentralistis telah berganti dengan desentralisasi mengenai format hubungan pusat dan daerah namun elemen-elemennya telah menata kembali diri mereka di dalam jaringan patronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair, dan saling bersaing satu sama lain. Bahkan beragam kepentingan yang sekarang memperebutkan kekuasaan di tingkat lokal tampak lebih bervariasi bila dibandingkan dengan masa Soeharto. Di dalam pusaran baru tersebut terlibat para pialang dan bandar politik ambisius, birokrat negara yang lihai dan masih bersifat predatoris, kelompok-kelompok bisnis baru yang ambisius, serta beraneka ragam gengster politik, kaum criminal, dan barisan keamanan sipil. Kebanyakan dari

⁹ Romli Atmasasita, Op.Cit.,

kelompok-kelompok ini dibesarkan oleh rezim lama sebagai operator dan pelaksana lapangan mereka.¹⁰

Hal ini akan tampak lebih jelas bila kita sekilas menilik kasus yang terjadi di kota Medan, Sumatera Utara. Di kota Medan muncul aktor-aktor politik baru semisal para pengusaha kecil dan menengah yang paling tidak sebagian tergantung kepada proyek dan kontrak negara, politisi profesional dengan kaitan khusus ke partai-partai Orde Baru, atau aktivis yang terkait dengan organisasi semacam (HMI), (KNPI), (GMNI), (GMKI) yang melalui mereka Orde Baru secara rutin merekrut kader-kader dan bandar politik baru. Dan yang tidak kalah pentingnya serta menjadi focus pembahasan ialah keberadaan preman yang terinstitusionalisasi dengan baik dalam berbagai organisasi kepemudaan (OKP) sebagai kaki tangan rezim lokal.¹¹

Pengaruh kelompok 'abu-abu' tersebut dapat terlihat jelas dari

¹⁰ Vedi R Hadiz. *Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*. LP3ES (2005), hal. 244

¹¹ *Ibid*, hal 244-245

perhelatan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) yang digelar di kota Medan pada tanggal 27 Juni 2005. Pasangan *incumbent* yakni H. Abdillah dan H. Ramli terpilih kembali menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan periode 2005-2010. Ia mendulang 489.010 suara sedangkan rivalnya yaitu pasangan Maulana Pohan dan Sigit Pramono Asri hanya memperoleh 292.803 suara.¹² Pasangan Abdillah-Ramli diusung oleh delapan partai yang mempunyai kursi di DPRD Kota Medan yang antara lain Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PAN, PDS, Partai Demokrat, PBR, PBB, dan Partai Patriot Pancasila. Yang tak kalah pentingnya mereka juga mendapat dukungan dari organisasi pemuda/preman yang berpengaruh yaitu Pemuda Pancasila, Ikatan Pemuda Karya, AMPI, FKPPi, hingga Pemuda Panca Marga.¹³

Peran yang dimainkan oleh organisasi pemuda/preman tersebut sangatlah signifikan. Tentunya elite-elite organisasi tak segan untuk memberikan dukungan 'otot maupun uang' kepada pasangan yang

¹² www.mediaindo.co.id

¹³ www.gatra.com

didukungnya. Sebagai contoh kecil pada suatu hari saat kampanye pasangan Abdillah-Ramli melintas di jalan raya sekelompok pemuda dari AMPI mengawal rombongan tersebut dengan seenaknya memakai jalan dan tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas.¹⁴ Di antara organisasi pemuda/preman dan pemimpin pemerintahan saling bekerja sama guna mencari keuntungan semisal alokasi kontrak dan lain-lain. Sehingga amat sulit bila seseorang yang berniat untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah di Kota Medan tanpa memiliki relasi yang baik dengan organisasi pemuda-preman yang berpengaruh.¹⁵

Keberadaan preman di kota Medan bukan hanya sebatas criminal jalanan semata. Ia telah menjadi entitas yang sangat berpengaruh dalam sistem politik lokal. Mengapa ia begitu berpengaruh? Institusionalisasi preman lah jawabannya. Preman di kota Medan menjadi begitu berpengaruh karena ia dilembagakan dan diorganisir

menjadi beragam organisasi.¹⁶ Misalnya tidak sedikit individu-individu yang sebelumnya dekat dengan dunia kekerasan menduduki posisi penting dalam hierarki organisasi politik. Bahkan banyak yang menjadi anggota legislative pusat maupun daerah.¹⁷ Organisasi 'preman' tersebut berafiliasi kepada partai politik dengan mempunyai kedudukan dan peran yang signifikan di dalamnya. Mereka mengendalikan dan memiliki akses yang luas terhadap sumber daya ekonomi.

Munculnya preman dengan posisinya yang kuat di kota Medan merupakan hasil dari produksi Orde Baru di masa lalu. Sebagai contoh salah satu tokoh Pemuda Pancasila yakni Amran YS, ia menceritakan peran organisasional yang dimainkannya bersama militer dalam pembasmian komunisme di Sumatera Utara pada dekade 1965-an. Kemudian ia beserta organisasinya memainkan peran sebagai operator politik selama masa Orde Baru. Selain aktif di dunia criminal, mereka juga menduduki posisi tersendiri dalam sistem Orde Baru

¹⁴ www.pemkomedan.go.id

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ www.theindonesianinstitute.org

yakni suatu tempat di antara elite politik formal dan apa yang dianggap banyak orang sebagai dunia gelap. Mereka sering kali dapat berbolak-balik antara dunia criminal dan dunia 'warga masyarakat terhormat' sebagai pengusaha atau tokoh masyarakat lainnya. Dengan runtuhnya Orde Baru tokoh-tokoh semacam itu menemukan kesempatan baru untuk memperbanyak kekuasaan, kekayaan, dan status sosial dengan menyusupkan diri sebagai pemegang kekuatan politik secara langsung.¹⁸

Para preman secara khusus mendapat tempat yang baik dalam sistem kekuasaan yang di dalamnya kemampuan untuk melakukan atau setidaknya mengancam dengan tindak kejahatan adalah penting guna mengendalikan keamanan bagi aparatur negara di tingkat lokal. Mereka dicari karena mengingat militer telah dipaksa mundur dari peran politik mereka seiring dengan iklim reformasi. Di samping menyediakan tenaga bagi calon-calon pejabat, para pemimpin organisasi pemuda—karena penguasaannya atas usaha-usaha

gelap yang menguntungkan—juga mampu membantu permintaan bantuan dana politik. Dengan otot dan uangnya mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan politik dan perdebatan di parlemen lokal termasuk berkaitan juga dengan alokasi kontrak dan sumber daya lainnya.¹⁹

Ada beberapa organisasi pemuda/preman yang sangat berpengaruh di kota Medan. Di antaranya ialah Pemuda Pancasila, Ikatan Pemuda Karya (IPK), dan Satgas PDIP. Konstelasi organisasi pemuda/preman di kota Medan sedikit berbeda dengan umumnya sebagian besar kota lain di Indonesia. Di Medan bukan hanya Pemuda Pancasila saja yang berkedudukan kuat namun justru anak organisasinya yakni Ikatan Pemuda Karya (IPK) menjadi saingan terbesarnya. Oloan Panggabean, seorang bos preman yang sangat legendaris, memimpin IPK dalam waktu yang lama. Di satu sisi ia sangat ditakuti oleh masyarakat kota Medan namun pada sisi lainnya ia dipuja-puja pula oleh masyarakat. Tak urung kebanyakan warga lokal

¹⁸ Hadiz, *op.cit.*, hal 249

¹⁹ *ibid.*, hal 250

menyebutnya sebagai 'walikota malam hari' di kota itu. Ia memperkuat kedudukannya di dalam masyarakat dengan melakukan banyak tindakan amal.²⁰

Ikatan Pemuda Karya pun lambat laun segera lebih kuat dibanding induk organisasinya dahulu yaitu Pemuda Pancasila. Anggota lapisan bawah dan tengah dari kedua organisasi tersebut secara rutin terlibat dalam persaingan brutal guna memperebutkan kendali atas dunia criminal di Medan. Namun ironisnya ketika anggota lapisan bawah dan menengahnya bertarung, para pemimpin puncaknya seperti Moses Tambunan dari IPK—Oloan telah menyerahkan tampuk pimpinan IPK kepada Moses tetapi ia tetap memiliki pengaruh yang sangat besar—dan Bangkit Sitepu dari Pemuda Pancasila malah menjadi sekutu akrab di tubuh Partai Golkar.²¹

Selain dari Golkar, PDI Perjuangan juga memiliki sayap organisasi pemuda/preman yang berafiliasi kepadanya yaitu Satgas (Satuan Tugas) PDIP. Diyakini

banyak anggota organisasi pemuda berbasis preman telah menyeberang ke Organisasi ini. Satgas PDIP dipimpin oleh seseorang yang bernama Marlon Purba. Ia adalah mantan anggota polisi dan criminal yang sekarang menjadi anggota parlemen dari PDIP.²²

Situasi yang terjadi di kota Medan dikenal dengan apa yang dinamakan dengan *shadow state* dalam khasanah ilmu pembangunan politik. Dalam ranah teoretis gagasan *shadow state* dimaksudkan sebagai konsekuensi dari rendahnya daerahat institusionalisasi sehingga negara menjadi sangat lemah. Bekerjanya *shadow state* juga disebabkan karena rendahnya kapasitas atau kemampuan negara dalam melaksanakan fungsi-fungsi dasarnya seperti mengatur/*regulating*, melayani/*servicing*, memungut/*extracting*, mengontrol/*controlling*. Negara yang terjangkiti oleh *shadow state* dianggap sebagai ciri dari negara preman (*warlord state*).²³

²² *ibid*, hal 250-251

²³ Amalinda Savirani. Pointers mata kuliah Pembangunan Politik

²⁰ *ibid*, hal 249

²¹ *ibid*, hal 249-250

Dalam kasus kota Medan terlihat sekali bahwa pemerintah yang dalam skala tertentu merupakan representasi dari negara mengalami sindrom *shadow state* tersebut. Pelembagaan atau institusionalisasi negara dalam masyarakat amatlah lemah. Ia tak bisa memenuhi beberapa fungsi dasar dari negara seperti mengontrol (*controlling*). Pemerintah dapat diistilahkan berada di bawah ketiak para preman yang berkuasa. Bahkan muncul anggapan yang berasal dari masyarakat bahwa walikota sesungguhnya kota Medan adalah Oloan Panggabean sang bos preman dan pimpinan organisasi pemuda setempat (IPK).²⁴

Institusi negara yang seharusnya memiliki keberadaan yang kuat dalam masyarakat telah secara signifikan terpengaruh oleh keberadaan tokoh-tokoh preman. Ada institusi informal yang dapat mengendalikan 'civitas' pemerintahan Kota Medan. *State Aparatus* atau aparat negara tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Dalam kasus pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) kota Medan seorang calon walikota tak

bisa langgeng duduk terpilih bila tanpa menjalin kerja sama dengan entitas preman di kota tersebut. Tentunya setelah terpilih walikota itu lebih mengutamakan para preman yang ada dibelakangnya ketimbang warga kota Medan sendiri. Kemudian hal ini berimbas pada berbagai kebijakan pemerintah.

Salah satu elemen yang fundamental dalam modernisasi sebagaimana diutarakan oleh Samuel Huntington adalah institusionalisasi atau pelembagaan politik. Pelembagaan politik yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Medan mengalami distorsi atau menyimpang dari kaedah semula. Pelembagaan politik tidak tercapai maksimal. Untuk Kota Medan fenomena preman menjadi satu variable pengaruh yang signifikan. Ketika urbanisasi sebagai efek berantai dari modernisasi dan pembangunan terjadi, justru di Kota Medan dan mungkin di kota-kota besar lainnya terjadi sesuatu hal yang paradoks. Premanisme muncul sebagai efek samping urbanisasi karena tak diikuti dengan langkah-langkah antisipatif seperti penyediaan lapangan pekerjaan.

²⁴ Ibid.

Fenomena *shadow state* ini tidak bisa dipaksakan menjadi ciri khas negara berkembang. Karena hal tersebut tidak mudah dibuktikan. Sulit bila kita ingin mengidentifikasinya secara pukol rata atau *gebyah uyah* karena fenomena *shadow state* di banyak tempat bersifat particular. Setiap kasus memiliki kekhasan tersendiri. Misalkan *shadow state* yang terjadi di Afrika khususnya Sierra Leone berada dalam posisi di luar formal state sedangkan di India ia justru berada di dalam institusi negara atau formal state.²⁵ Pada intinya patologi tersebut biasa diidap oleh negara berkembang yang tak bisa memodernisasikan dirinya secara sempurna. Akan tetapi bukan berarti hal ini hanya terjadi di negara berkembang, ditengarai di negara maju pun fenomena ini dapat terjadi.

Selain itu fenomena tersebut tidak akan pernah lepas dari pergumulan perebutan kekuasaan di mana setiap orang mempunyai dorongan yang berbeda-beda sehingga jalan yang ditempuh pun akan berbeda-beda. Menurut

Bertrand Rusell (1872-1970)²⁶ dorongan atau motivasi bagi seorang manusia berbuat sesuatu bukanlah dorongan seks seperti yang dikatakan Sigmund Freud (Bapak Psikoanalisa),²⁷ akan tetapi adalah dorongan untuk mendapat atau memegang kekuasaan. Masih menurut Russel, dorongan pada kekuasaan itu berbentuk eksplisit pada pemimpin yang ingin berkuasa dan bersifat implisit pada manusia yang bersedia mengikuti sang pemimpin.

Jadi seorang pemimpin berhasil berkuasa, bukan hanya karena dorongan hendak berkuasa yang ada dalam dirinya sendiri. Ada pula dorongan hendak berkuasa dalam diri orang lain, tetapi cukup dengan menjadi pendukung atau pengikut sang penguasa. Dengan berbuat begitu, para pendukung dan pengikut orang yang berkuasa, merasa diri mereka juga telah ikut berkuasa, dan dorongan kepada kekuasaan dalam diri mereka telah terpenuhi. Dorongan untuk berkuasa ini pada banyak orang seakan tak kenal batas. Kenyataan serupa inilah

²⁵ Ibid

²⁶ Hidayat, Op.Cit.,

²⁷ Ibid.

yang melahirkan pemimpin-pemimpin dari zaman dulu hingga ke zaman modern untuk mencoba mengabadikan atau meluaskan kekuasaan mereka selama dan seluas mungkin. Kaisar-kaisar Roma meluaskan kerajaan Roma dahulu ke mana-mana, Napoleon yang coba menaklukkan Eropa, dan meluaskan kekuasaannya hendak menaklukkan Mesir pula, timbulnya seorang Hitler sebelum perang dunia kedua merupakan beberapa contoh sejarah. Peran Serta Masyarakat.²⁸

Untuk 'melahirkan' pemimpin yang sebenar pemimpin diperlukan peran serta masyarakat yang terus-menerus berjuang, mengkritisi setiap langkah dari kekuasaan (pemerintah) yang berkecenderungan otoriter, menindas, zalim dan tiran. Bila kekuasaan dibiarkan, lambat atau cepat ia akan menggiring rakyat ke dalam oritarianisme, penindasan, kezaliman dan tiranisme. Sebab, naluri (nafsu) untuk lebih berkuasa tak ubahnya seperti nafsu hendak kaya, dapat berkembang seperti tanpa batas sama sekali.

²⁸ Ibid.

Kekuasaan memang memiliki pesona tertentu bagi orang yang berkuasa. Jika makan nasi ada saat orang merasa kenyang, tidak demikian dengan kekuasaan. Keinginan yang terus membesar itu sepertinya tak bertepi. Untuk melanggengkan kekuasaan, maka dilakukanlah hegemoni. Sehingga peraturan yang dibuat berkecenderungan memihak kepada orang-orang yang berkuasa, bukan kepada rakyat²⁹.

Charles Samford mengatakan bahwa ketidakberdayaan masyarakat dan hukum (*the inertia of society and law*) adalah akibat tidak tumbuhnya perubahan akibat tatanan social dan tatanan hukum yang amburadul.³⁰

KESIMPULAN

Demikianlah cerita singkat mengenai premanisme dan pembangunan politik di Indonesia. Pergantian 'suasana' dari rezim Orde Baru ke era reformasi tidak mengubah secara fundamental elemen predatoris yang hidup selama Orde Baru berkuasa. Mereka hanya

²⁹ Ibid.

³⁰ Zainal Abidin, Modul Kuliah Sosiologi Hukum Magister Hukum UII.

bertransformasi dan menyusup kembali dalam sistem politik yang baru. Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada satu sisi menjadi arena pertempuran baru dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya di daerah. Dengan beranjang sana ke Kota Medan kita dapat mengetahui bahwa ada entitas lain di luar negara yang berpengaruh besar bagi jalannya pemerintahan. Kemunculan preman pun tak bisa dilepaskan dari premis modernisasi dan pembangunan. Ia ada karena tak adanya langkah antisipatif terhadap efek samping yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Mahfud MD, Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia, ctk Pertama, Gama Media, 1999

Hadiz, Vedi R. Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto. Jakarta: LP3ES, 2005.

Zainal Abidin, Modul Kuliah Sosiologi Hukum Magister Hukum UII.

Amalinda Savirani. Pointers mata kuliah Pembangunan Politik

www.mediaindo.ac.id. Abdillah Terpilih Lagi Jadi Walikota Medan. Berisi: laporan pilkada Kota Medan yang dimenangkan oleh pasangan Abdillah-Ramli (2 Juli 2005 oleh redaksi mediaindo)

www.gatra.com. Tanpa Judul. Berisi: jibaku pasangan Abdillah-Ramli menjadi walikota dan wakil walikota Medan (20 Agustus 2005 oleh redaksi gatra)

www.pemkomedan.go.id. Tanpa Judul. Berisi: kampanye pasangan Abdillah-Ramli yang dikawal oleh AMPI (6 Juli 2005 oleh Abah Ontohod)

www.theindonesianinstitute.org. Institusionalisasi Premanisme Harus Diakhiri. Berisi: kasus penyerangan preman anak buah Tommy Winata terhadap kantor majalah Tempo (19 Maret 2003 oleh Elwin Tobing)

Hidayat Banjar, Premanisme Politik Dan Politik Preman dalam www.waspada.com